

STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DAN PROGRAM DESA BINAAN/MITRA KERJA IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Maksudin

Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga

Abstract

Realization of founding village program by IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta is an integral part in Tri Dharma Perguruan Tinggi (The three responsibilities of institute of higher education), that is social service. The village is previously selected and determined through an observation or a feasibility study and potential and requirements analysis performed in nominated village.

Besides, determination of founding village is guided by a guideline that is published by DP3M Depdikbud and the policy of IAIN Sunan Kalijaga with respect to poverty (economic matters) and underdevelopment syndrome (educational matters and faith unsafe) in the village.

Each of founding villages has different characteristics. Generally, each of them has some potentials, i.e. human resources, natural resources, require some developing processes, i.e. through educating, teaching and training. Development of these potentials can be planned by founding village program and developmental strategy.

I. Pendahuluan

Program desa binaan/desa mitra kerja IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diujicobakan pada tahun 1994. Berdasarkan hasil uji coba tersebut, mulai tahun 1995 program itu dipandang perlu untuk dilanjutkan pelaksanaannya hingga saat ini. Sejak pelaksanaan uji coba pada tahun 1994, desa sebagai tempat atau sasaran program desa binaan/desa mitra kerja dan waktu berlangsungnya tidak bersifat tetap atau tidak selalu sama. Ada suatu desa yang selama lima tahun, berturut-turut, menjadi lokasi program, bahkan dalam kurun waktu itu dilakukan pula perluasan lokasi

dan kegiatan, dan ada pula suatu desa yang dijadikan lokasi program selama 4 atau 3 tahun bahkan ada pula yang hanya selama satu tahun. Pada umumnya lokasi dan waktu pelaksanaan program ditetapkan berdasarkan observasi, studi kelayakan atau evaluasi yang dilakukan oleh Tim Desa Binaan/Mitra Kerja IAIN Sunan Kalijaga. Berdasarkan hasil observasi atau studi kelayakan yang telah dilakukan itu, Tim Desa Binaan/Mitra Kerja kemudian menentukan dan menetapkan apakah sebuah desa layak atau tidak untuk dijadikan khalayak sasaran atau lokasi desa binaan atau desa mitra kerja.

Kelayakan sebuah desa untuk dijadikan sasaran program pada dasarnya ditentukan berdasarkan beberapa faktor. Hal itu sejalan dengan pendapat Mangkuprawiro¹ bahwa untuk memilih dan menentukan permasalahan dalam masyarakat dilakukan analisis situasi yang mencakup analisis kebutuhan dan analisis potensi desa yang perlu untuk dipenuhi dan dibangunkembangkan. Sehubungan dengan hal itu, Sukijo² juga menyampaikan bahwa untuk memilih dan menentukan suatu desa bina/desa mitra kerja sebelumnya perlu dilakukan studi kelayakan. Studi kelayakan itu pada dasarnya juga untuk mengetahui potensi dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.³ Lebih jauh lagi, hasil penelitian atau analisis kebutuhan atau analisis potensi yang telah diperoleh itu lebih baik kemudian diseminarkan, diusulkan, dan ditetapkan sebagai program institut. Selanjutnya, program itu dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dengan memperhatikan prinsip prioritas sesuai dengan urgensinya dalam masyarakat khalayak sasaran.

Selama ini, proses pemilihan dan penetapan desa binaan yang dilakukan oleh Tim Desa Binaan/Mitra Kerja PPM IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui observasi atau studi kelayakan sebagaimana dikemukakan di atas. Memang diakui bahwa sampai saat ini pemilihan dan penetapan desa binaan belum dilakukan melalui hasil penelitian ilmiah dan hasil seminar. Barangkali hal itu terjadi karena hingga saat ini belum ada penelitian dan atau hasil penelitian unggulan kemitraan yang benar-

¹Syafri Mangkuprawira. 1993. "Metode Analisis dan Pemecahan Masalah Masyarakat", dalam Agus Salim Sitompul. *Metodologi Pengabdian Pada Masyarakat*. Yogyakarta: P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. p. 14

²Sukidjo. "Tujuan dan Khalayak Sasaran PPM", dalam *Jurnal Aplikasi*. Vol. 1 No.1 Desember 2000. Yogyakarta: P2M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. p. 73

³Lihat pula J.B. Banawiratma, S.J. 1991. *Iman, Pendidikan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Kanisius. p. 37

benar didasarkan pada analisis kebutuhan dan analisis potensi khalayak sasaran. Namun demikian, pelaksanaan program desa binaan itu senantiasa didasarkan pada pedoman yang berlaku yang dikeluarkan oleh DP3M Depdikbud (Depdiknas), sehingga secara ideal fungsi program pengabdian pada masyarakat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selama ini mencakup (i) pengamalan ilmu pengetahuan agama Islam, (ii) peningkatan relevansi antara program IAIN dan kebutuhan masyarakat, (iii) pemberian stimulan pelaksanaan pembangunan fisik dalam masyarakat, dan (iv) pelaksanaan pengembangan pola pembangunan wilayah terpadu/daerah melalui kerja sama antar departemen atau antar lembaga terkait.

Akhirnya dapat disampaikan dalam tulisan ini bahwa dalam menentukan dan menetapkan desa binaan/desa mitra kerja sebagai sasaran atau lokasi program, Tim Desa Binaan/Mitra Kerja PPM IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berupaya mendasarkan diri pada beberapa hal berikut: (i) hasil observasi atau studi kelayakan, (ii) pedoman yang dikeluarkan oleh DP3M Depdikbud (Depdiknas), dan (iii) kebijakan PPM IAIN Sunan Kalijaga yang berkenaan dengan sindrom kemiskinan, sindrom keterbelakangan dan ketertinggalan dalam bidang pendidikan dan akidah.

Lebih jelasnya, berbagai konsep yang berkenaan dengan pemilihan dan atau penentuan desa binaan/desa mitra kerja sebagaimana dikemukakan di atas, termasuk pula pemilihan dan penentuan program-program kegiatannya, dapat dikemukakan dalam bentuk diagram berikut ini.



II. Potensi Desa Binaan/Desa Mitra Kerja

Yang dimaksud potensi dalam tulisan ini adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan.⁴ Pengertian itulah yang dalam konteks ini dipergunakan untuk menilai masyarakat sebagai khalayak sasaran program. Jadi, dengan batasan ini Tim Desa Binaan/Desa Mitra Kerja IAIN Sunan Kalijaga berupaya menilai, mengidentifikasi, dan merumuskan potensi yang dimiliki oleh setiap desa binaan/desa mitra kerja. Dengan kata lain, untuk bisa menentukan dan menetapkan program-program kegiatan desa binaan/desa mitra kerja, terlebih dahulu Tim berupaya untuk mengidentifikasi dan merumuskan daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh khalayak sasaran yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk program atau kegiatan desa binaan. Atas dasar studi kelayakan itu pula Tim merumuskan berbagai strategi penanganannya.

Pembahasan potensi desa binaan dalam makalah ini terbatas pada tiga hal, yaitu (i) potensi sumber daya manusia, (ii) potensi sumber daya alam/lingkungan, dan (iii) potensi perekonomian desa.

A. Potensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil telaah Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup⁵, kualitas manusia secara garis besar dikelompokkan dalam dua bagian. Pertama, kualitas fisik yang menyangkut ciri-ciri kualitas yang bersifat badaniah, seperti ukuran dan bentuk badan, daya atau tenaga pikiran, kesegaran atau kesehatan jasmani dan sejenisnya. Ini semua merupakan kualitas pribadi yang melekat pada diri individu. Kedua kualitas nonfisik atau kejiwaan. Kualitas nonfisik dapat merupakan: (i) kualitas pribadi yang melekat pada diri, (ii) kualitas hubungan dengan pihak lain seperti dengan Tuhan, alam lingkungan, masyarakat, dan sesama manusia, dan (iii) kualitas karya sebagaimana tercermin dalam produktivitas disiplin kerja, keswadayaan, keswakarsaan dan wawasan masa depan. Kedua kelompok kualitas tersebut harus saling melengkapi secara seimbang. Dalam ajaran Islam manusia menyerahkan diri kepada Allah dan

⁴Depdikbud. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud. p. 697

⁵Emil Salim. 1991. "Sumber Daya Manusia dalam Perspektif", dalam Conny R. Semiawan Soedijarto. *Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI*. Jakarta: PT. Grasindo. p. 29-30

membebaskan diri dari sembahsan lain. Melalui iman kepada Allah manusia membangun individualitasnya sebagai makhluk yang bebas dan dengan kebebasannya manusia memiliki kesempatan untuk mengembangkan pembentukan kepribadian. Untuk mengembangkan kepribadian manusia memerlukan cara peribadatan untuk mencapai kualitas spiritual utama yang disebut "taqwa". Dengan kata lain, penekanan pembentukan dan pengembangan potensi sumber daya manusia terletak pada kualitas spiritual.

Penekanan kedua adalah pada kualitas bermasyarakat dan kualitas berbangsa. Penekanan ketiga adalah pada kualitas kekaryaan yang dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu (i) faktor pribadi (kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman sikap kerja), (ii) faktor lingkungan dalam organisasi (situasi kerja, kepemimpinan, dan yang serupa), dan (iii) faktor lingkungan luar organisasi (nilai sosial ekonomi, keadaan tekanan ekonomi dan yang serupa)

Kualitas spiritual, kualitas bermasyarakat, dan kualitas kekaryaan merupakan tiga kualitas yang perlu dikembangkan dalam diri manusia. Dalam proses pengembangan kualitas ini, mengingat besarnya tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia di masa depan, perlu dikembangkan manusia yang bertakwa, punya kepekaan sosial, dan pribadi mandiri.

Kemandirian seseorang sebagaimana dimaksud dalam pernyataan di atas, menurut hasil telaah K LH, memiliki lima komponen utama, yaitu

1. **bebas**, yakni tumbuhnya tindakan atas kehendak sendiri dan bukan kehendak orang lain, bahkan tidak tergantung pada orang lain;
2. **progresif dan ulet**, yakni tampak pada usaha mengejar prestasi, penuh ketekunan, merencanakan dan mewujudkan harapan-harapannya;
3. **berinisiatif**, yakni mampu berpikir dan bertindak secara orisinil, kreatif, dan penuh inisiatif;
4. **pengendalian** dari dalam, adanya kemampuan mengatasi masalah yang dihadapi, mampu mengendalikan tindakannya serta kemampuan mempengaruhi lingkungan atas usaha sendiri; dan
5. **kemantapan diri**, mencakup aspek percaya kepada diri sendiri dan memperoleh kepuasan atas usaha sendiri.

Pada umumnya masyarakat desa binaan/desa mitra kerja IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masih sangat membutuhkan penekanan kualitas spiritual, kualitas bermasyarakat dan kualitas kekaryaan. Dengan demikian, potensi sumber daya manusia pada desa binaan/desa mitra kerja pengembangannya melalui pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dengan kata

lain potensi sumber daya manusia dapat ditingkatkan kualitasnya melalui proses pendidikan agar masyarakat semakin memiliki kualitas spiritual, sosial, dan kekaryaannya yang semakin memadai.

Berdasarkan data yang diperoleh, potensi sumber daya manusia yang ada di desa binaan/desa mitra kerja pada umumnya belum berkualitas. Hal ini terutama bila ditinjau dari segi rendahnya tingkat pendidikan warga masyarakat. Di sisi lain, pengetahuan akan agama yang mereka yakini pun rata-rata masih kurang mengembirakan. Hal itu salah satu di antaranya juga disebabkan oleh kurangnya tokoh agama baik sebagai imam, khatib, dai, ustadz, muballigh maupun takmir masjid. Lebih-lebih bila dihubungkan dengan jumlah penduduk, tokoh/pemuka agama masih sangat kurang. Di samping itu, masyarakat desa binaan/desa mitra kerja pada kenyataannya masih memberikan harapan-harapan yang menyejukkan, yakni masih kentalnya rasa kebersamaan, gotong-royong dan kekeluargaan, sehingga proses pengembangan potensi sumber daya manusia masih sangat mungkin untuk dikembangkan terus-menerus.

B. Potensi Sumber Daya Alam/Lingkungan

Pertumbuhan penduduk yang relatif pesat saat ini merupakan suatu fenomena bangsa dan negara yang memerlukan penanganan serius. Salah satu penanganan yang cukup penting ialah upaya peningkatan produksi pangan, khususnya beras, sehingga bisa mencapai kondisi swasembada pangan. Untuk masa-masa yang akan datang, kiranya kebijakan swasembada pangan ini sangat sulit untuk diupayakan atau dipertahankan. Salah satu di antaranya disebabkan oleh adanya kelangkaan air dan kekurangcocokkan tanah untuk tanaman padi lahan basah. Oleh karena itu, perlu diupayakan kebijakan persebaran pola pangan di satu pihak dan terobosan teknologi tanaman pangan di pihak lain serta penyesuaian sistem olah tanam dengan kondisi lahan yang tersedia menurut kadar produktivitas yang sebaik-baiknya. Produktivitas tanah sebaiknya perlu menjadi pertimbangan dengan mengembangkan pola tanam dan menghindari penyamarataan pola tanam di seantero tanah air.

Jika ditelusuri gangguan lingkungan pada pembangunan, tampak bahwa yang menimbulkan gangguan adalah sumber daya alam milik bersama, seperti sungai, laut, waduk, hutan, tanah, dan udara. Ini berarti bahwa proses pengambilan keputusan ekonomi melalui suatu proses yang tidak atau kurang mengindahkan nasib sumber daya alam milik bersama tersebut di atas. Di samping itu, sering terjadi pula tingkat efisiensi

penggunaan sumber daya alam milik bersama sangatlah rendah dan boros. Fenomena semacam itu tentu saja sangat membutuhkan penanganan yang serius dan mendesak agar setiap upaya pengembangan bidang ekonomi senantiasa memperhatikan berbagai faktor yang tampaknya non-ekonomis sebagaimana disebutkan di atas. Ini berarti bahwa perlu intervensi dari luar pasar untuk mengoreksi kekurangan yang terjadi dalam pertimbangan ekonomi pasar.

Lebih jauh lagi perlu dipikirkan pula agar dampak positif kegiatan pembangunan pada sumber daya alam milik bersama ditingkatkan, tetapi dampak negatifnya dikendalikan. Berbagai dampak ini secara sadar untuk diperhitungkan melalui kebijakan dalam proses perkembangan ekonomi. Pola pikir ini memberi tempat yang layak kepada masyarakat yang terkena dampak kerusakan. Konsumen pemakai sumber daya alam milik bersama adalah masyarakat umum sehingga sudah sewajarnya pula apabila perhatian lebih besar dicurahkan pada mereka yang menderita dampak pembangunan. Umumnya kelompok penduduk yang rawan tertimpa dampak pembangunan secara negatif adalah kelompok penduduk yang miskin, yang tidak mempunyai sumber daya alam milik sendiri dan mengandalkan hidupnya pada kehadiran sumber daya alam milik bersama. Karena itu, pintu masuk ke arah sumber daya alam milik bersama perlu dipelihara agar senantiasa terbuka bagi kelompok penduduk miskin. Umumnya kelompok miskin ini tidak memiliki keahlian dan kemampuan untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan semacam juru bicara yang bisa menyuarakan kepentingan mereka yang "tidak bisa berbicara". Biasanya fungsi juru bicara ini dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, yakni kelompok penduduk yang memiliki kepedulian terhadap kelompok penduduk miskin yang menderita oleh karena dampak pembangunan itu.

Oleh karena itu, kehadiran LSM merupakan bagian integral dari sistem pengembangan pola pengelolaan sumber daya alam milik bersama. Dalam hal ini, LSM bisa menjalankan fungsi advokasi, mengungkapkan kepentingan kelompok penduduk penderita dampak pembangunan dan yang sangat bergantung pada sumber daya alam milik bersama. Selanjutnya, pola pembangunan berkelanjutan adalah cara membangun sumber daya alam yang bisa meningkatkan kesejahteraan generasi masa depan. Pola pembangunan berkelanjutan seperti ini melahirkan proses pembangunan dengan wawasan lingkungan. Dengan adanya uraian pengelolaan sumber daya alam secara berlanjut tersebut di atas, tampak

bahwa dalam tata kehidupan ini dibutuhkan pengertian tentang hubungan manusia dengan lingkungan alam. Perlu dipahami bersama bahwa tidak semua lingkungan alam yang menjadi lingkungan hidup mampu menopang proses kehidupan ini.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, kondisi desa binaan/desa mitra kerja yang selama ini menjadi fokus perhatian Tim Desa Binaan/Desa Mitra Kerja IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat diilustrasikan sebagai berikut.

1. potensi sumber daya alam/lingkungan yang ada di desa binaan/desa mitra kerja pada umumnya berupa lahan pertanian dan perkebunan yang pada umumnya kurang subur untuk dicocoktanami karena terletak pada dataran tinggi, sehingga justru banyak lahan pertanahan yang "nganggur" karena kekurangan air. Oleh karena itu, potensi sumber daya alam/lingkungan desa binaan/desa mitra kerja dapat dikategorikan kurang produktif,
2. kondisi lingkungan nampak luas akan tetapi kurang mendukung laju pembangunan secara serentak dan cepat dalam waktu yang singkat, dan
3. interaksi sosial di antara warga masyarakat desa binaan/desa mitra kerja sangat terbatas karena letak rumah yang satu dengan yang lain berjauhan. Hal itu tentu saja sangat berpengaruh terhadap laju informasi yang semestinya diterima dan diketahui bersama.

C. Potensi Perekonomian Masyarakat Desa Binaan/Desa Mitra Kerja

Desa binaan/desa mitra kerja IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah desa-desa yang pada umumnya tergolong desa dalam kategori tertinggal, terbelakang, atau miskin. Desa-desa itu pada umumnya merupakan desa penerima program IDT. Disebut desa miskin karena mayoritas warga masyarakatnya memiliki pengetahuan yang terbatas. Kurangnya pengetahuan seperti itu merupakan salah satu faktor atau sumber timbulnya kemiskinan.⁶

Kemiskinan yang melanda daerah pedesaan yang bersifat kompleks sulit untuk diatasi tanpa melakukan rekonstruksi atau restrukturisasi sistem

⁶Soedjito Sosrodihardjo. 1995. "Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Transformasi Sosial", dalam Ade Ma'ruf WS dan Zulfan Heri. *Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. p. 19

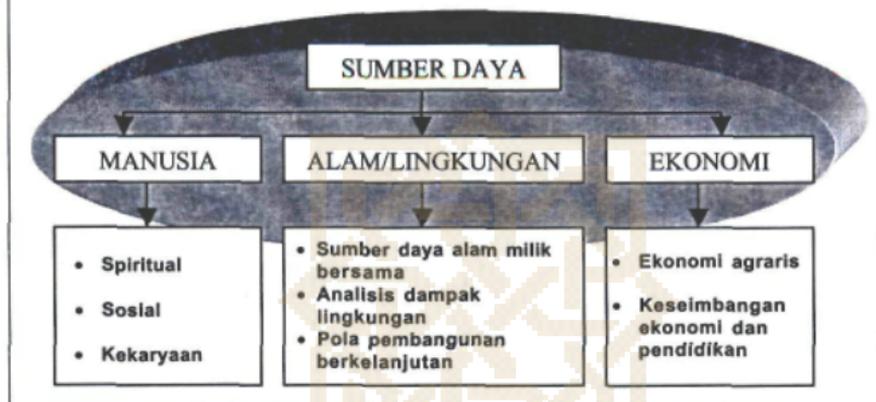
ekonomi yang sudah berjalan dan mapan. Padahal untuk melakukan pembenahan tingkat ekonomi itu sama saja dengan melakukan semacam revolusi yang sudah dapat dipastikan merupakan masalah yang serius.

Kondisi perekonomian warga masyarakat desa binaan/desa mitra kerja secara umum dapat dikategorikan lemah atau berada pada peringkat ekonomi lemah. Namun demikian, di dalam dasawarsa terakhir ini telah banyak kemajuan yang didapat di bidang ekonomi dan perencanaan pendidikan, serta lebih dimengerti pula bagaimana perkembangan pendidikan ditentukan oleh ekonomi dan sebaliknya.

Kini sudah terasa sekali bagaimana resesi ekonomi yang melanda negeri ini memberikan dampak kepada pendidikan. Resesi ekonomi dibarengi oleh masalah lapangan kerja, inflasi yang tinggi dengan akibatnya terjadi kendala hebat pada anggaran belanja termasuk anggaran pendidikan. Memang resesi ekonomi berpengaruh juga pada perekonomian masyarakat desa tanpa terkecuali, akan tetapi masyarakat desa yang mayoritas hidup secara agraris dalam menghadapi permasalahan ekonomi lebih bersifat tegar dan dinamis, artinya masyarakat tetap bekerja sebagaimana adanya dan berpengharapan sebagaimana biasanya. Bahkan ada beberapa desa binaan / desa mitra kerja IAIN yang mengkoordinir warga masyarakat desa untuk bersama-sama memanfaatkan potensi ekonomi (misalnya berupa pasir, batu kali, untuk diproduksi menjadi konblok, batako, cobek, lampion dan sejenisnya), begitu pula desa yang banyak rumput dan lahan kosong dimanfaatkan untuk pemeliharaan hewan ternak (misalnya, kambing dan kelinci) dan tanaman-tanaman produksi (misalnya melinjo, rambutan dan sejenisnya). Di samping itu, untuk menunjang kegiatan perekonomiannya, banyak warga yang membutuhkan sarana perekonomian tertentu, seperti gerobak sayur, alat-alat pembuatan cobek, cetakan batako, dan cetakan konblok.

Berbagai hal yang berkenaan dengan potensi desa binaan/desa mitra kerja yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami lebih jelas lagi melalui diagram berikut ini.

POTENSI DESA BINAAN/DESA MITRA KERJA



III. Program Desa Binaan/Desa Mitra Kerja

Program desa binaan/desa mitra kerja IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada mulanya ditekankan pada bidang keagamaan, bidang budaya, pendidikan dan ekonomi. Hal ini sesuai dengan misi IAIN membangun masyarakat lewat bahasa agama. Pada tahun 2001 fokus program desa binaan/ desa mitra kerja lebih dipersempit pada dua bidang, yaitu bidang agama dan bidang ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas kiranya prioritas program desa binaan/ desa mitra kerja IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lebih terfokus pada bidang garapan berikut ini.

1. Pengembangan SDM melalui pendidikan, pengajaran, dan pelatihan.
2. Penyuluhan akan pentingnya menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pemberdayaan potensi alam dan lingkungan dengan lebih mementingkan pemeliharaan, pengolahan, pemanfaatan potensi alam dan lingkungan secara maksimal yang didasarkan pada azas kebersamaan, gotong royong, dan kekeluargaan.
3. Upaya peningkatan ekonomi melalui enterpreuner (wirausaha), penerapan teknologi tepat guna, pola tanam yang memadai dan berupaya membangun potensi ekonomi berdasarkan pembangunan ekonomi

berbasis rakyat/ekonomi kerakyatan.

4. Program penyuluhan agama dan pengadaan sarana peribadatan bagi masyarakat desa binaan/desa mitra kerja lebih ditekankan pada pembentukan masyarakat Islami.

IV. Strategi Pengembangan Potensi Desa Binaan/Desa Mitra Kerja

Pengembangan potensi desa binaan/desa mitra kerja memerlukan strategi yang sesuai dan cocok untuk masing-masing desa bina/desa mitra kerja. Penentuan strategi itu didasarkan pada empat unsur strategi, yaitu: (i) menentukan pendekatan dan tujuan yang hendak dicapai, (ii) memilih metode, teknik dan prosedur, (iii) memilih model pengembangan yang sesuai, dan (iv) melaksanakan evaluasi.

Strategi pengembangan potensi dalam makalah ini akan dibahas secara umum, tidak spesifik pada salah satu potensi desa, akan tetapi pembahasan lebih menekankan pada pengembangan sumber daya manusia melalui proses pendidikan dan pembelajaran.

A. Pendekatan dan Tujuan Program Pengembangan SDM

Pengembangan sumber daya manusia kiranya lebih sesuai jika menggunakan pendekatan humanistik, yaitu "memanusiakan manusia". Pada hakekatnya pendekatan ini memposisikan sumber daya manusia pada posisi yang sangat strategis karena pengembangan manusia itu sendiri tidak dapat berdiri sendiri, namun justru setiap diri manusia berkedudukan dan berfungsi sama baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan dan mendapat perlakuan yang manusiawi dengan menghargai martabatnya sebagai pribadi-pribadi yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah membentuk manusia seutuhnya sebagai perwujudan dari konsep kemanusiaan dalam rangka pembangunan masyarakat yang memerlukan subsistem yang relevan.

B. Memilih Metode, Teknik, dan Prosedur yang Sesuai

Metode atau teknik serta prosedur pengembangan sumber daya manusia yang dipandang paling sesuai ialah metode, teknik, dan prosedur yang ditetapkan dengan berdasar pada pendekatan serta tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan pendekatan humanistik dan tujuan umum yang telah ditetapkan, kiranya kita dapat dipilih suatu metode

pengembangan yang relevan. Metode pengembangan yang bisa dijadikan alternatif di antaranya ialah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, curah pendapat, simulasi dan bermain peran, sedangkan teknik yang merupakan implementasi dari metode dapat ditentukan dengan disesuaikan pada metode yang dipilih. Demikian pula penentuan prosedurnya. Artinya, prosedur yang sesuai adalah prosedur yang sangat berkaitan dengan rangkaian metode dan teknik yang telah ditentukan. Prosedur ini lebih menggambarkan pada langkah-langkah yang dilalui dalam proses pengembangan.

C. Menentukan Model Pengembangan

Suatu model pengembangan dapat ditentukan dengan dasar pertimbangan fokus penekanan pengembangan. Untuk fokus pengembangan sumber daya manusia kiranya model pemecahan masalah merupakan alternatif yang paling sesuai. Menurut Paulo Freire⁷, model pembelajaran menghadapi masalah (*problem posing education*) dapat diterapkan untuk mengembangkan kesadaran kritis dan pemecahan masalah melalui aktivitas refleksi dan aksi. Sebagai ilustrasi ialah adanya tradisi *rembug keluarga* yang berkembang dalam masyarakat. Melalui tradisi itu, seseorang bisa mengumpulkan anggota keluarga untuk memperoleh masukan dari anggota keluarga lebih tua atau muda dalam memecahkan masalah kehidupan. Demikian pula setiap masyarakat memiliki tradisi *rembug desa* yang membahas permasalahan lingkungan, usaha bersama, kelompok tani, permasalahan pembangunan desa dan masalah-masalah lain yang aktual yang terjadi di masyarakat desa tersebut.

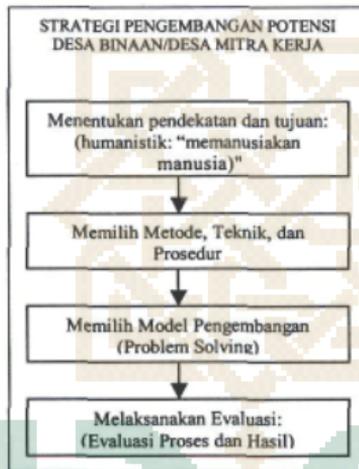
D. Menentukan Evaluasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Strategi penentuan evaluasi merupakan bagian inti dari upaya pengembangan, yaitu sebagai tolok ukur keberhasilan suatu program pengembangan dari segi efektivitas dan efisiensi program yang telah dicanangkan. Keberhasilan dan kegagalan suatu program atau kegiatan harus ditinjau melalui evaluasi. Alternatif bentuk evaluasi yang bisa diterapkan di antaranya ialah evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses dilaksanakan bersamaan dan seiring dengan laju pelaksanaan program atau

⁷Paulo Freire. 1977. *Pedagogy of The Oppressed*. New Zealand: Penguin Books Australia Ltd.

kegiatan itu sendiri, sedangkan evaluasi hasil dilaksanakan pada akhir kegiatan. Evaluasi proses biasanya digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan atau proses kegiatan sementara evaluasi hasil dipakai untuk mengukur keberhasilan produk atau capaian.

Agar lebih mudah dipahami, strategi pengembangan potensi desa binaan/desa mitra kerja seperti yang telah diuraikan di atas dapat dikemukakan lagi dalam bentuk diagram berikut ini



V. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pemilihan dan penetapan desa binaan/desa mitra kerja IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta didasarkan pada hasil observasi atau studi kelayakan dan pedoman yang dikeluarkan DP3M Depdikbud serta kebijakan IAIN Sunan Kalijaga yaitu adanya sindrom kemiskinan, dan sindrom ketertinggalan (pendidikan dan kerawanan akidah).
2. Desa binaan/desa mitra kerja secara umum memiliki tiga macam potensi yaitu potensi sumber daya manusia, sumber daya alam/lingkungan dan potensi perekonomian desa. Potensi-potensi dimaksud membutuhkan sekali pengembangan, terutama melalui proses pendidikan, pengajaran dan pelatihan.
3. Pengembangan potensi-potensi desa binaan/desa mitra kerja melalui

- program sistematis dan terpadu yang penekanannya pada pengembangan sumber daya manusia (aspek spiritual, kemasyarakatan dan karya). Pengembangan potensi alam/lingkungan dan pengembangan perekonomian desa (misalnya: *enterpreneur*, perbaikan pola tanam dsb.).
4. Strategi pengembangan desa binaan/desa mitra kerja didasarkan pada pendekatan dan tujuan yang hendak dicapai, pemilihan metode, teknik dan prosedur, memilih model pengembangan, serta melaksanakan evaluasi proses dan hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Banawiratma, J.B. 1991. *Iman, Pendidikan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.
- Depdikbud. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Emil Salim. 1991. "Sumber Daya Manusia dalam Perspektif", dalam Conny R. Semiawan Soedijarto . *Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Freire, Paulo. 1977. *Pedagogy of The Oppressed*. New Zealand: Penguin Books Australia Ltd.
- Gerchenkron, Alexander. 1994. "Modernisasi Dunia Pengusaha (Entrepreneur)", dalam Myron Weiner. *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moeslim, Abdurrahman. 1990. "Dakwah Islam dalam Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan: Mencari Visi Baru Dakwah Transformatif", dalam *Akademika*. No. 01. TH VIII.. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Pranjoto Setjoatmodjo. 1983. "Pembaharuan Konsep Kemanusiaan dalam Pendidikan", dalam *Dialog Manusia, Falsafah, Budaya dan Pembangunan*. Surabaya: YP2LPM.
- Soedjito Sosrodihardjo. 1995. "Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Transformasi Sosial", dalam Ade Ma'ruf WS dan Zulfan Heri. *Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukidjo. "Tujuan dan Khalayak Sasaran PPM", dalam *Jurnal Aplikasi*. Vol. 1 No.1 Desember 2000. Yogyakarta: P2M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Syafri Mangkuprawira. 1993. "Metode Analisis Dan Pemecahan: Masalah

Masyarakat”, dalam Agus Salim Sitompul. *Metodologi Pengabdian Pada Masyarakat*. Yogyakarta:P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

